

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Abdullah, Rozali. 2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Agustina, Shinta. 2015. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 44 (4) : 503-510.
- Harahap, Zairin. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- HR., Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah. 2017. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung : Nusa Media.
- Indroharto. 1996. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku II. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Irfani, Nurfaqih. 2020. Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 16 (3) : 305-325
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Marbun, S.F. 2011. *Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*. Yogyakarta : FH. UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mertokusumo, Soedikno. 2007. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurhayati, Yati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Nusa Media.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soeroso, R. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Tjandra, W. Riawan. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

Umam, Habibul. 2017. Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 1 (2) : 191-199.

Wiyono, R. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga..* Jakarta : Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 170/G/2018/PTUN.SMG

